

Dr. H. Salim HS., S.H., M.S.

HUKUM PERTAMBANGAN

MINERAL & BATUBARA



SINAR GRAFIKA



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	11
A. Pengertian Hukum Pertambangan Mineral dan Ba- tubara	11
B. Karakteristik Hukum Pertambangan Mineral dan Ba- tubara	21
C. Asas-Asas Hukum Pertambangan Mineral dan Ba- tubara	22
D. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara	25

E. Hubungan antara Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Hukum Pajak, Hukum Kehutanan, dan Hukum Agraria	29
---	----

BAB 3 KAJIAN YURIDIS TENTANG MINERAL DAN BATUBARA	36
A. Pengertian Mineral dan Batubara	36
B. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Pertambangan Mineral dan Batubara	41
C. Jenis-Jenis Mineral dan Batubara	48
D. Tujuan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	55
E. Penguasaan Negara atas Mineral dan Batubara	57
F. Kewenangan Negara dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	62
G. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara	67

BAB 4 WILAYAH PERTAMBANGAN	75
A. Pengertian Wilayah Pertambangan	75
B. Aspek Hukum Wilayah Pertambangan	78
C. Perencanaan Wilayah Pertambangan	78
D. Penggolongan Wilayah Pertambangan	81
E. Kriteria dalam Penetapan Wilayah Pertambangan	83
F. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Wilayah Pertambangan	85

BAB 5 IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)	89
A. Pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	89
B. Landasan Hukum Izin Pertambangan Rakyat	91
C. Jenis Kegiatan Pertambangan Rakyat	93
D. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan IPR	94
E. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Pertam- bangan Rakyat	94
F. Prosedur dan Syarat untuk Memperoleh Izin Pertam- bangan Rakyat	95
G. Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat	97
H. Jangka Waktu Berlakunya Izin Pertambangan Rakyat	98
I. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat	98
J. Berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat	100
K. Analisis Sosio-Yuridis terhadap Kegiatan Penam- bangan Rakyat	101

BAB 6 KAJIAN NORMATIF TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)	107
A. Pengertian Izin Usaha Pertambangan	107
B. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan	111
C. Macam-Macam Izin Usaha Pertambangan	111
D. Yang Berhak Mengajukan IUP Mineral dan Batubara	112
E. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Per- tambangan Mineral dan Batubara	116
F. Sistem Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	118

G. Prosedur dan Syarat-Syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)	128
H. Substansi Izin Usaha Pertambangan (IUP)	136
I. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan	139
J. Hubungan Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Atas Tanah	143
K. Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan	144
L. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan	145
M. Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pertambangan	147
N. Perpanjangan Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan	150
O. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan	152
P. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan	153

BAB 7 IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA 156

A. Pengertian Izin Usaha Pertambangan Khusus	156
B. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	159
C. Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan Khusus	161
D. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus	164
E. Yang dapat Mengajukan Permohonan IUPK	165
F. Tahapan Pemberian WIUPK	166
G. Prosedur dan Syarat-Syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	172
H. Substansi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	175
I. Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus	178

J. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus	179
K. Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	188
L. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	191
M. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Khusus	192
N. Hubungan Izin Usaha Pertambangan Khusus dengan Hak Atas Tanah	194
O. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus	195

BAB 8 SISTEM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATU-BARA DI NEGARA LAIN 198

A. Philipina	198
B. Ghana	203
C. Kanada	207

BAB 9 KAJIAN EMPIRIS TERHADAP SENGKETA DI BIDANG PERTAMBANGAN 209

A. Istilah dan Pengertian Sengketa Tambang	209
B. Teori-Teori yang Menganalisis tentang Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa di Bidang Pertambangan ..	211
C. Macam-Macam Sengketa di Bidang Pertambangan	215
D. Sengketa antara <i>Indigeneos People</i> dengan Perusahaan Tambang	216
E. Sengketa Pencemaran Lingkungan	222
F. Sengketa Hak Atas Tanah	228
G. Sengketa Divestasi Saham	235

H. Sengketa Program <i>Community Development</i>	243
I. Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertambangan	248

BAB 10 SANKSI ADMINISTRATIF DALAM BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 266

A. Pengertian Sanksi Administratif	266
B. Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif	268
C. Jenis-Jenis Pelanggaran yang dapat Dijatuhkan Sanksi Administratif	270
D. Pelanggaran oleh Pemegang IUP	270
E. Pelanggaran oleh Pemegang IPR	277
F. Pelanggaran oleh Pemegang IUPK	279

BAB 11 SANKSI PIDANA DALAM BIDANG PERTAM- BANGAN 287

A. Pengertian Sanksi Pidana dalam Bidang Pertambangan	287
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan	290
C. Lembaga yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Bidang Pertambangan	294
D. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Pertambangan	297
E. Sanksi Pidana yang dapat Dijatuhkan pada Orang Perorangan	298
F. Sanksi Pidana yang dapat Dijatuhkan pada Pengurus dan Badan Hukum	310

DAFTAR PUSTAKA 313

PROFIL PENULIS 325